

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *INTERNET*
FINANCIALREPORTING (IFR) PADA PEMERINTAH
DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Menyelesaikan

Derajat Sarjana S1



Disusun oleh :

Gielda Ayu Ratu Balqis

Nim : 31401900070

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**Faktor Yang Mempengaruhi *Internet Financial Reporting* (IFR) Pada
Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah**

Disusun Oleh :

Gielda Ayu Ratu Balqis

Nim : 31401900070

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan
panitia sidang ujian dalam penelitian skripsi

Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, Juli 2023

Pembimbing

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Dr, Edy Supriyanto, SE, M.Si., Akt., CA

NIDN : 0628068202

HALAMAN PERSETUJUAN

“Faktor Yang Mempengaruhi *Internet Financial Reporting* (IFR) Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah”

Disusun Oleh :

Gielda Ayu Ratu Balqis

Nim : 31401900070

Telah diujikan didepan penguji

Pada Tanggal 27 Juli 2023

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt., CA
NIDN : 0628068202

Penguji

Ahmad Hijri Alfian, S.E., M.Si
NIK. 211421032

Penguji

Jodi Budiman, S.E., M.Sc., Akt
NIDN : 0605017202

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

Ketua Program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN : 0611088001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Gielda Ayu Ratu Balqis

NIM : 31401900070

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan penelitian skripsi “**Faktor Yang Mempengaruhi *Internet Financial Reporting* (IFR) Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah**” adalah benar-benar asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam usulan penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Semarang, Juli 2023



Gielda Ayu Ratu balqis

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gielda Ayu Ratu Balqis

NIM : 31401900070

Program Studu : S1 Akuntansi'

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“Faktor Yang Mempengaruhi *Internet Financial Reporting* (IFR) Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan , dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus2023



Gielda Ayu Ratu Balqis

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ingat janji Allah swt. Bahwa “Setelah Kesulitan Ada Kemudahan” (QS Al-Insyirah Ayat 5-6) Allah tak pernah ingkar janji

Kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan. Jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba, setidaknya satu kali lagi.

- Thomas A. Edison -

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk Allah Swt. Yang selalu memberikan kemudahan dan rahmatnya dalam penyusunan skripsi ini dan selanjutnya saya persembahkan untuk diri sendiri yang sudah mau bertahan sejauh ini hingga skripsi selesai, dan selanjutnya untuk kedua orang tua saya yang tanpa lelah dengan penuh kasih sayang yang selalu memanjatkan doa yang luar biasa untuk anaknya serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih atas pengorbanan dan kerja keras dalam mendidik saya

ABSTRAK

Judul penelitian **Faktor Yang Mempengaruhi *Internet Financial Reporting (IFR)* Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah**. Perkembangan mengenai informasi dan komunikasi yang begitu maju serta meningkat dengan sangat pesat maka diharapkan kemampuan pada Dinas Pemerintah Daerah dalam pengungkapan laporan keuangannya. Transparansi dan ketersediaan informasi sektor publik yang ada di Indonesia semakin berkembang dengan adanya *website* yang dimiliki pemerintah daerah sebagai salah satu sarana pengungkapan laporan keuangan.

Jenis penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder. Populasi penelitian yaitu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, sampel menggunakan metode sampel jenuh yaitu ada 108 sampel. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan uji t dan uji f. Analisis regresi linier berganda menggunakan uji koefisien determinasi dengan bantuan SPSS.

Hasil penelitian data terdistribusi secara normal, tidak terjadi multikolinieritas, tidak ada gejala heterokedastisitas dan gejala autokorelasi. Hasil uji f secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan hasil uji t pendapatan perkapita berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Sedangkan ukuran pemerintah, belanja daerah, kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Kata Kunci : Ukuran Pemerintah, Pendapatan Perkapita, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan.

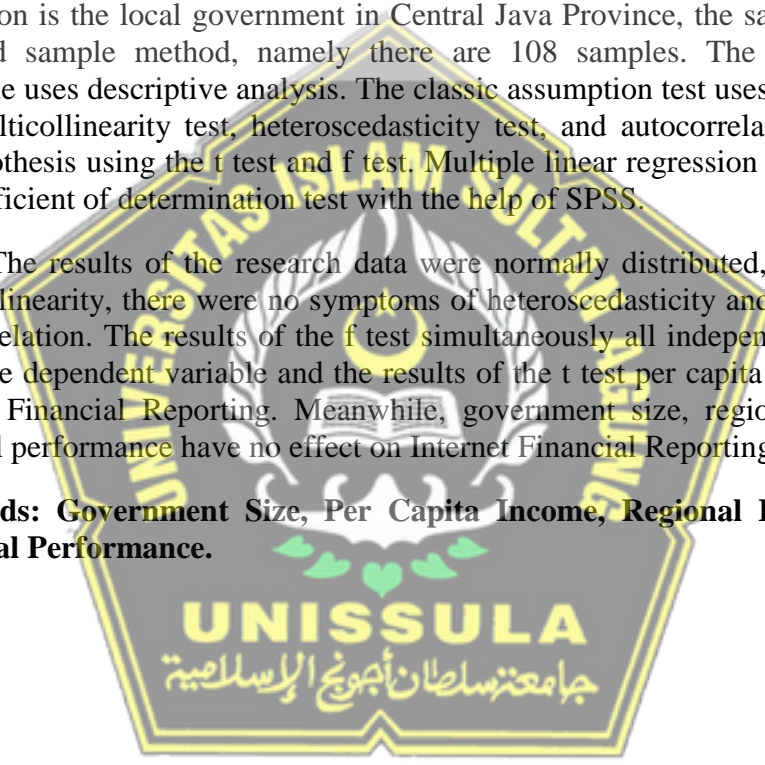
ABSTRACT

Research title **Factors Influencing Internet Financial Reporting (IFR) in Local Governments in Central Java Province**. Developments regarding information and communication are so advanced and increasing very rapidly that it is hoped that the ability of the Regional Government Service in disclosing its financial reports. Transparency and availability of public sector information in Indonesia is growing with the existence of websites owned by local governments as a means of disclosing financial statements.

This type of quantitative research uses secondary data. The research population is the local government in Central Java Province, the sample uses the saturated sample method, namely there are 108 samples. The data analysis technique uses descriptive analysis. The classic assumption test uses the normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test. Test the hypothesis using the t test and f test. Multiple linear regression analysis using the coefficient of determination test with the help of SPSS.

The results of the research data were normally distributed, there was no multicollinearity, there were no symptoms of heteroscedasticity and symptoms of autocorrelation. The results of the f test simultaneously all independent variables affect the dependent variable and the results of the t test per capita income affect Internet Financial Reporting. Meanwhile, government size, regional spending, financial performance have no effect on Internet Financial Reporting.

Keywords: Government Size, Per Capita Income, Regional Expenditures, Financial Performance.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah serta inayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penelitian dengan judul **Faktor Yang Mempengaruhi *Internet Financial Reporting* (IFR) Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah** disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan segala hormat serta kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat serta doa, kepada :

1. Bapak Dr, Edy Supriyanto, SE, M.Si., Akt., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya serta tenaga dengan penuh kesabaran dalam membimbing, memberikan arahan, kritik, saran, dan memotivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak,CA selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyو, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak dan Ibu Tersayang, Alm. Bapak Suwanto dan Ibu Masriyah yang selalu mendoakan serta mendukung dari semua aspek baik secara moral maupun materiil.
5. Adik saya Delfin Fawazzhida dan David Maulana yang selalu mendoakan dan mendukung serta memotivasi saya agar cepat lulus kuliah.
6. Teman –teman seperjuangan yang senantiasa menemani dan berjuang bersama dan selalu memberikan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Mahatma Aditya Wijaya yang selalu menemani, mendukung, membantu, dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat selesai.

Semoga seluruh bimbingan, bantuan dan dukungan yang diberikan kepada peneliti mendapat balasan pahala yang berlipat ganda nantinya dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan baik dari sisi akademik maupun non akademik serta memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Semarang, Juli 2023

Peneliti

Gielda Ayu Ratu Balqis

31401900070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRACT.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.2 Internet Financial Reporting.....	10
2.3 Ukuran Pemerintah.....	11
2.4 Pendapatan Perkapita.....	12
2.5 Belanja Daerah.....	13
2.6 Kinerja Keuangan.....	14
2.7 Penelitian Terdahulu.....	15
2.8 Pengembangan Hipotesis.....	20

2.8.1 Pengaruh Ukuran Pemda Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i>	20
2.8.2 Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i>	22
2.8.3 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i>	23
2.8.4 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i>	25
2.9 Kerangka Pemikiran Teoritis	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Populasi dan Sampel	30
3.2.1 Populasi	30
3.2.2 Sampel	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Metode Pengumpulan Data	32
3.5 Operasionalisasi Variabel	32
3.5.1 Variabel Dependen (Y)	32
3.5.2 Variabel Independen (X)	34
3.6 Teknik Analisis	36
3.6.1 Statistik Deskriptif	37
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	37
3.6.2.1 Uji Normalitas Residual	37
3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas	38
3.6.2.2 Uji Multikolinieritas	38
3.6.2.3 Uji Autokorelasi	39
3.6.3 Pengujian Hipotesis	39
3.6.3.2 Uji Signifikan Parameter Individu (Uji t)	40
3.6.3.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F)	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	42
4.2 Analisis Data Deskriptif	43
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	46

4.3.1 Uji Normalitas Residual.....	46
4.3.2 Uji Multikolinieritas	47
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	48
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	49
4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	51
4.5 Pengujian Hipotesis	53
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi	53
4.5.2 Uji F	54
4.5.3 Hasil Uji Hipotesis.....	55
4.6 Pembahasan	57
4.6.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> 57	
4.6.2 Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i>	59
4.6.3 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i>	60
4.6.4 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> ..	61
BAB VKESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Implikasi Penelitian.....	63
5.2.1 Implikasi Teoritis.....	63
5.2.2 Implikasi Praktis	63
5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran.....	64
5.3.1 Keterbatasan Penelitian.....	64
5.3.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian	42
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif	45
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas One- Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	46
Tabel 4. 4Hasil Analisis Uji Multikolinearitas	47
Tabel 4. 5Hasil Uji Heteroskedastisitas- Uji Glejser	48
Tabel 4. 6Hasil Uji Autokorelasi – Durbin Watson.....	49
Tabel 4. 7Hasil Uji Regresi.....	51
Tabel 4. 8Uji Koefisien Determinasi	53
Tabel 4. 9 Hasil Uji F.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis 28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1DaftarSampel Pemerintah Daerah di Jawa Tengah	69
Lampiran 2Total Dokumen yang Diupload Di <i>Website</i>	70
Lampiran 3Total Aset	72
Lampiran 4Total Pendapatan Perkapita	77
Lampiran 5 Total Belanja Daerah	80
Lampiran 6Total Defisit/ Surplus (Kinerja Keuangan).....	83



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan mengenai informasi dan komunikasi yang begitu maju serta meningkat dengan sangat pesat maka diharapkan kemampuan pada Dinas Pemerintah Daerah dalam pengungkapan laporan keuangannya. Transparansi dan ketersediaan informasi sektor publik yang ada di Indonesia semakin berkembang dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut secara tidak langsung bertujuan bahwa pemerintah berkewajiban mengungkapkan informasi publik secara lebih transparan, bisa dipertanggungjawabkan, dan lebih mengutamakan pada pelayanan masyarakat yang bisa dijangkau secara cepat, mudah, efisien, dan mudah dipahami (2008). Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di tengah masyarakat, maka IFR menyediakan berbagai keuntungan dalam menyajikan informasi keuangan yang berkualitas lebih tinggi, meringankan biaya dan bisa menjangkau para pengguna secara luas (Nosihana dan Yaya, 2016).

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemda terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR). Contohnya seperti penelitian yang dilakukan Masra & Sari (2020) meneliti terkait pendapatan perkapita, belanja daerah, ukuran legislatif berpengaruh terhadap IFR dalam praktik pelaporan keuangan yang ada di situs *website* pemerintah daerah. Dari penelitian yang dilakukan Masra dan Sari, (2020)

memiliki referensi jurnal dari Juniantika dan Hapsari (2020) yang meneliti tentang tingkat kekayaan daerah, tingkat utang pemerintah daerah, dan opini audit berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting sebesar 9,81% secara simultan.

Selain itu masih banyak lagi penelitian tentang *Internet Financial Reporting* pada sektor publik. Seperti penelitian dari Nosihana dan Yaya (2016) dengan hasil penelitian bahwa kompetisi politik, ukuran pemda, rasio pembiayaan utang, kekayaan pemda, dan opini audit berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting melalui e- government. Menurut Mutiha (2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD), ukuran pemda, pendapatan perkapita, rasio belanja daerah belum menjadi faktor penentu yang dapat menjelaskan aksesibilitas *Internet Financial Reporting*.

Bukan hanya sektor publik, tetapi dari sektor non publik juga banyak faktor faktor yang mempengaruhi Internet Financial Reporting. Mooduto (2015) melakukan penelitian ini untuk membuktikan adanya pengaruh tingkat informasi pengungkapan IFR terhadap reaksi investor, dan ruang lingkup pengungkapan IFR berpengaruh terhadap abnormal return saham perusahaan. Indikasi bahwa level perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap implementasi IFR pada perusahaan publik Indonesia. Namun , foreign ownership tidak memberikan dampak pada implementasi IFR pada perusahaan publik Indonesia Setiawan (2020). Penelitian yang dilakukan Virgiawan dan Diyanty (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang dikendalikan keluarga tidak terbukti memiliki tingkat asimetri informasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan

yang dikelola selain keluarga. Sementara itu penerapan IFR terbukti dapat menurunkan tingkat asimetris informasi pada perusahaan.

Mungkin Penelitian sebelumnya dari sektor publik meneliti seperti belanja pemerintah daerah, *Service Level Solvency* berbasis nilai aset, pendapatan perkapita, pengeluaran daerah, ukuran legislatif, tingkat kekayaan daerah, tingkat utang, opini audit, dan kompetisi politik berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan tidak terdapat konsistensi dari hasil penelitian Masra dan Sari (2020) bahwa ukuran pemda tidak ditemukan pengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nosihana dan Yaya (2016) menyatakan bahwa ukuran pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR).

Tingkat korupsi masih menjadi tantangan utama Indonesia. Menurut survei yang dilakukan *Transparency International* CPI Indonesia tahun 2018 berada di skor 38 dan berada di peringkat 89 dari 180 Negara yang disurvei (2019). Masalah korupsi yang dihadapi Indonesia harus segera dihilangkan. Oleh karena itu, Pengungkapan laporan keuangan melalui internet merupakan salah satu bentuk dari penanggulangan tindak korupsi. Faktor tindakan korupsi tersebut yaitu kurang memadai sistem akuntabilitas yang benar dan kelemahan sistem pengendalian dan pengawasan. Faktor yang mempengaruhi IFR salah satunya yaitu ukuran pemerintah yang berfungsi untuk memudahkan pemerintah daerah

dalam melihat skala untuk mengukur besar kecilnya sebuah pemerintahan. Faktor selanjutnya yaitu Pendapatan perkapita karena dengan faktor tersebut dapat melihat seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Faktor ketiga yaitu belanja daerah karena untuk melihat anggaran yang diperoleh dengan realisasinya sesuai atau tidak. Faktor yang terakhir yaitu kinerja keuangan karena dengan kita mengukur kinerja keuangan maka dapat menilai apakah kinerja pemerintah sudah baik atau masih kurang dalam menjalankan tugasnya.

Jawa Tengah merupakan daerah yang mempunyai 29 Kabupaten dan 6 Kota. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Jawa yang letaknya dihimpit oleh dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Luas wilayahnya sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia) (<https://jatengprov.go.id/sejarah/>). Daerah yang cukup luas untuk diteliti dari segi pemerintah daerahnya mengenai pengungkapan informasi keuangannya. Menurut Masra dan Sari (2020) akuntabilitas publik telah meningkat dalam 7 tahun terakhir (2012-2019), dimana seluruh pemda mempublikasikan pada *website* resmi yang dimiliki dan dapat diakses. Namun dengan perilaku tersebut tidak terjadi transparansi publik pada provinsi Jawa Tengah, dimana masih ada beberapa Kabupaten yang bersedia mengungkapkan secara terbatas dokumen terkait pengelolaan anggaran daerah (hanya 7-9 dokumen dari total 12 dokumen).

Faktor dari kantor pemda di daerah yang kecil yang kemungkinan penggunaan internet kurang dimaksimalkan dengan baik, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Internet Financial Reporting*, selain itu kurangnya partisipasi pemerintah daerah dalam melakukan transparansi terkait mempublikasikan laporan keuangan kepada publik. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Transparansi pada Pemerintah Daerah. Penelitian ini mengacu pada Masra dan Sari (2020). Selain itu penelitian IFR pada pemerintahan di Jawa Tengah sangat jarang dilakukan, untuk itu peneliti tertarik dengan penelitian di Jawa Tengah agar dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sampel penelitian ini mengambil dari pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian di pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera. Selain itu peneliti mengambil variabel independen yaitu ukuran pemda, pendapatan perkapita, belanja daerah serta peneliti menambahkan variabel baru yaitu kinerja keuangan. Penambahan variabel baru karena kinerja keuangan yang dilakukan pemda menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber keuangan daerah yang dilakukan secara maksimal guna membiayai berjalannya sistem pemerintahan yang struktur, pelayanan masyarakat, pembangunan daerah (Nufus dkk., 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Ukuran Pemda terhadap *Internet Financial Reporting*?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap *Internet Financial Reporting*?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap *Internet Financial Reporting*?
4. Bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Internet Financial Reporting*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh Ukuran Pemda terhadap *Internet Financial Reporting*
2. Menganalisis pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap *Internet Financial Reporting*
3. Menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap *Internet Financial Reporting*
4. Menganalisis pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Internet Financial Reporting*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi akademis hasil penelitian ini bisa diharapkan dan menjadi tolak ukur, serta referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Internet Financial Reporting*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan panduan kepada aparatur pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah agar dapat mencapai sistem *Internet Financial Reporting* yang lebih baik dan menjadi good governance.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi terhadap kepentingan pribadi / individu tetapi pada hasil yang utama untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Teori tersebut menganggap keberhasilan suatu organisasi yaitu dengan tidak egois dalam mementingkan kepentingan individu diatas kepentingan organisasi.

Organisasi sektor publik memiliki tugas dan wewenang dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* sebagai pemerintah dengan *principals* sebagai rakyat. Hubungan tersebut tercipta karena adanya sifat dasar manusia yang memiliki sifat dapat dipercaya, berintegritas, rasa ingin tahu dan bertanggung jawab. Pemerintah sebagai *stewards* yang memiliki banyak informasi untuk bisa diungkapkan kepada rakyat dengan cara transparan dan tidak dimanipulasi sesuai apa yang sudah diharapkan dari rakyat dengan harapan dan kepercayaan yang sudah diberikan rakyat kepada pemerintah (Nosihana dan Yaya, 2016). Pendekatan *Stewardship* digunakan sebagai pendekatan untuk titik tumpu yang utama dalam suatu laporan keuangan (Djoko dan Susanto 1994).

Jefri (2018) berasumsi bahwa teori *stewardship* terdapat nilai kepuasan atau manfaat yang lebih besar pada perilaku kerja sama organisasi dari pada perilaku individualisme sehingga bagian pengelola akan lebih meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengefektifkan pengendalian internal dan menciptakan budaya organisasi yang lebih baik dan kuat dan didukung adanya komitmen organisasi untuk menghasilkan *good governance*.

Teori *stewardship* adalah suatu keadaan yang menggambarkan dimana manajer sebagai *stewardship* lebih memfokuskan kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan untuk keinginan pribadi (Jannah, 2016). Teori tersebut menjelaskan bahwa pemerintah sebagai organisasi nirlaba lebih mengutamakan kepentingan umum dan tidak berfokus pada keuntungan yang dimiliki namun kesejahteraan yang utama. Untuk itu teori ini sangat cocok digunakan dalam penelitian ini dan *relate* jika dikaitkan dengan semua variabel penelitian.

Dalam *Stewardship Theory*, pelaku *stewardship* adalah pemerintah yang memiliki fungsi dalam mengelola sumber daya dan yang menjadi *principal* adalah rakyat sebagai pemilik sumber daya. Kesepakatan yang terjadi antara pemerintah (*stewardship*) dan rakyat (*principal*) terjalin berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi (Jatmiko, 2020). Dalam sebuah organisasi sektor publik akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah, pemerintah mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam mengungkapkan segala informasi, baik informasi keberhasilan maupun informasi kegagalan yang dialami organisasi tersebut (Jatmiko, 2020).

Implikasi pada teori *stewardship* terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu dapat menjelaskan dan menggambarkan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya akan menampung aspirasi dari masyarakat, dapat memberikan fasilitas pelayanan umum yang baik, dan mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang telah diamanahkan dari masyarakat kepada pemerintah, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan yang dimiliki masyarakat bisa tercapai secara maksimal (Jannah, 2016).

2.2 Internet Financial Reporting

Menurut Undang- Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103 (2004) menyatakan bahwa informasi yang ada dalam Sistem Keuangan Daerah (SIKD) adalah data yang transparan, dapat diakses dan diperoleh oleh masyarakat, sehingga Informasi yang ada mengenai laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hak yang dimiliki masyarakat dan menjadi kewajiban bagi pemerintah.

Laporan keuangan harus transparansi serta akuntabilitas yang dapat efektif apabila informasi yang dimuat dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat diakses semua pihak maka laporan keuangan dipublikasikan melalui media-media yang dapat dijangkau masyarakat, seperti surat kabar dan internet (Wau, 2015). Teknologi yang dapat dinilai efektif untuk publikasian laporan keuangan adalah Internet. Dengan cara disampaikan melalui *website* pemerintah yang bisa dibuka oleh semua pihak dan adanya keterbukaan serta transparansi. Styles dan Tennyson (2007) menyatakan bahwa internet merupakan media yang

mampu dijangkau oleh masyarakat dan merupakan sarana yang efektif bagi pemerintah dalam mempublikasikan informasi laporan keuangan publik secara online.

Penyampaian melalui internet atau disebut dengan *Internet Financial Reporting* (IFR) merupakan cara dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah kepada masyarakat secara transparan dan efektif melalui *website* pemerintahan (Wau, 2015). Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 3, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang harus mempunyai prinsip akurat, relevan, dan mampu dipertanggungjawabkan (2005).

2.3 Ukuran Pemerintah

Ukuran pemerintahan merupakan sebuah bentuk yang dapat dinilai dalam memperlihatkan besar kecilnya pemerintahan (Hartono, 2014). Pemerintah daerah yang mempunyai ukuran besar mampu memberikan layanan yang cukup baik kepada masyarakat. Keinginan dan keharusan pemerintah daerah akan memicu kinerja pemerintah daerah yang lebih baik (Masra dan Sari, 2020). Besarnya aset yang dimiliki suatu daerah dapat diartikan besar juga ukuran pemda tersebut. Semakin besar aset, semakin besar pula modal yang ditanamkan.

Hadianto dan Murtin (2020) mengatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintahan maka akan semakin besar pula keinginan dari masyarakat terhadap aset pemerintah. Jika masyarakat beranggapan negatif karena kinerja pemerintah dapat diatasi dengan adanya transparansi atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan begitu untuk mengurangi kecurigaan masyarakat maka

pemerintah daerah harus bisa mengeluarkan atau mempublikasi laporan keuangan melalui *website* pemerintah agar bisa dijangkau masyarakat.

Maka dari itu ukuran pmda yang besar dapat diidentifikasi pula memiliki kekayaan yang besar juga, adanya kekhawatiran masyarakat terhadap penyelewengan dana pemerintahan. Oleh karena itu pengawasan dari masyarakat terhadap pemerintah akan semakin ketat (Masra dan Sari, 2020). Untuk menghindari kecurigaan masyarakat tentang penyelewengan dana maka pemerintah seharusnya mempublikasikan laporan keuangan melalui internet agar bisa diakses semua pihak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fatwa Amaliah (2019), Nosihana dan Yaya (2016), Wau (2015).

2.4 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan perkapita berasal dari hasil pembagian pendapatan di suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut (Triandy dan Amir, 2014). Menurut Triandy dan Amir (2014) juga menjelaskan bahwa perekonomian yang ada di sekitar masyarakat daerah tersebut dapat mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat, bukan hanya itu perekonomian masyarakat mempengaruhi teknologi yang di aplikasikannya. Dengan begitu pengungkapan pelaporan keuangan di internet bisa terpengaruh oleh pendapatan perkapita.

Pendapatan per kapita merupakan ukuran dari jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara ataupun wilayah. Semakin tinggi pendapatan perkapita di suatu daerah maka semakin tinggi kecenderungan pemerintah untuk menyampaikan informasi laporan keuangan pada website yang dimiliki pemerintah daerah tersebut (Styles dan Tennyson, 2007). Pendapatan perkapita merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah, hal ini juga dapat digunakan sebagai ukuran dari tingkat produktivitas masyarakat (Wau, 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Triandy dan Amir (2014) level perekonomian masyarakat di sebuah daerah dapat mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat dan tingkat perekonomian juga mempengaruhi teknologi yang masyarakat dapatkan. Semakin besar pendapatan masyarakat di suatu daerah maka akan semakin tinggi kemampuan untuk dapat menggunakan teknologi dalam mendapatkan informasi (Hadianto dan Murtin, 2020).

2.5 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan segala bentuk belanja yang berada di pemerintah baik belanja secara langsung, ataupun belanja tidak langsung yang akan mempengaruhi berkurangnya nilai kekayaan bersih yang ada di daerah tersebut (Putri dan Setiawan, 2022). Dengan begitu belanja daerah dipergunakan untuk mendanai proses atau urusan yang menjadi tanggungjawab Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Berbagai bentuk belanja daerah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat, memberikan pelayanan yang baik dan memberikan fasilitas yang layak untuk publik. Semakin tinggi belanja daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menggunakan anggarannya dengan tepat sasaran dan untuk kepentingan publik, sehingga pemerintah mempunyai keinginan dan wewenang dalam penyampaian laporan keuangan melalui internet dengan *website* pemerintah (Alhajjriana dkk., 2018)

Menurut UU No. 32 tahun 2004, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (2004). Hal ini bisa terwujud jika dalam pelayanan terhadap masyarakat berupa peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial (Mutih, 2017). Hal ini bisa dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, maka akan semakin tinggi pula keinginan pemda untuk memberikan informasi pelayanan melalui *website* pemda.

2.6 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjelaskan tentang kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dengan cara memaksimalkan agar dapat membiayai berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah (Nufus dkk., 2019). Kinerja keuangan yang baik maka sistem pemerintahan bisa dikatakan akan baik juga, tetapi apabila kinerja keuangan buruk maka pemerintah akan membatasi

akses informasi laporan keuangan kepada semua pihak (Graven dan Marston, 1999).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2014) kinerja keuangan diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat, dimana pengukurannya dilakukan dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan, selain itu kinerja keuangan memiliki manfaat yaitu menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema dan pelaksanaannya.

Dengan begitu peran kinerja keuangan pemerintah sangatlah penting untuk memberikan hasil yang baik bagi masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah yang baik maka akan semakin sejahtera pula sistem pelayanan kepada masyarakat, tetapi jika kinerja keuangan yang dijalankan buruk maka akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi Internet Financial Reporting pada Pemerintahan Daerah telah dilakukan oleh berbagai peneliti terdahulu.

Tabel 2. 1
Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	Shanti. R. H. Nufus, Titiek Herwanti (2019)	-Independen : Opini Audit, Kinerja Keuangan, Leverage -Dependen : <i>Internet Financial Reporting</i>	-Sampel: Purposive sampling, yang dilakukan 203 Pemda -Metode : Penelitian Eksplanatori	Kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IFR , Opini audit dan Leverage berpengaruh positif terhadap IFR tetapi tidak signifikan.
2.	Evin Amaliyah Masra, Vita Fitria Sari (2020)	-Independen : Ukuran Pemerintah, Pendapatan Perkapita, Belanja Daerah -Dependen : <i>Internet Financial Reporting</i>	-Sampel : Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat -Metode : Penelitian Kuantitatif, desain Kausalitas	Pendapatan perkapita dan belanja daera berpengaruh terhadap IFR, tetapi Ukuran Pemerintah tidak ditemukan pengaruh terhadap IFR.
3.	Ikhlas Wau (2015)	-Independen : Kompetisi politik, Pendapatan perkapita, Ukuran Pemerintah, Rasio kemandirian Financial, Opini Audit -Dependen : Ketersediaan dan Keteraksesan IFR	-Sampel : 112 Pemerintah Daerah yang ada di Pulau Jawa -Metode : Regresi Logistik Ordinal dan Regresi Berganda	Pendapatan perkapita dan opini audit (Regresi Logistik Ordinal) berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan, tetapi resiko kemandirian finansial (Regresi berganda) berpengaruh positif juga terhadap keteraksesan informasi keuangan.

4.	Ariefia Nosihana, Rizal Yaya (2016)	<p>-Independen :</p> <p>Ukuran Pemda, Opini Audit, Kompetisi politik, Rasio Pembiayaan Utang (<i>Leverage</i>)</p> <p>-Dependen :</p> <p><i>Internet Financial Reporting</i></p>	<p>-Sampel :</p> <p>Pemerintah kota dan Kabupaten di Indonesia</p> <p>-Metode :</p> <p>Regresi Berganda</p>	<p>Kompetensi Politik dan Ukuran Pemda berpengaruh Positif terhadap IFR, sedangkan <i>Leverage</i>, Opini Audit tidak berpengaruh terhadap IFR</p>
5.	Arthaingan H. Mutiha (2017)	<p>-Independen :</p> <p>Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Belanja Daerah</p> <p>-Dependen :</p> <p>Aksesibilitas <i>Internet Financial Reporting</i></p>	<p>-Sampel :</p> <p>Pemerintah Kota/ Kabupaten di Jawa Barat</p> <p>-Metode :</p> <p>Regresi linier berganda</p>	<p>Pendapatan asli daerah, pendapatan perkapita, dan belanja daerah belum menjadi faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas <i>Internet Financial Reporting</i></p>
6.	Pepie Diptyana (2019)	<p>-Independen :</p> <p><i>Likuiditas, Leverage, Service Level Solvency (SLS) berbasis aset, SLS berbasis belanja, Ketergantungan daerah</i></p> <p>-Dependen :</p> <p><i>Internet Financial Reporting</i></p>	<p>-Sampel :</p> <p>91 Kantor pemerintah daerah di Indonesia</p> <p>-Metode :</p> <p>Regresi Berganda</p>	<p>Hasil penelitian bahasa SLS berbasis belanja berpengaruh signifikan negatif terhadap IFR, sedangkan SLS berbasis aset berpengaruh signifikan positif terhadap IFR</p>

7.	Mia Dewi Trisnawati, Komarudin Achmad (2013)	<p>-Independen :</p> <p>Persaingan politik, Ukuran pemerintah, Kekayaan daerah, Opini audit</p> <p>-Dependen :</p> <p>Determinan Publikasi Laporan Keuangan</p>	<p>-Sampel :</p> <p>210 Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia</p> <p>-Metode :</p> <p>Purposive Sampling</p>	<p>Ukuran pemerintah, Leverage, Kekayaan daerah berpengaruh signifikan dalam mempublikasikan laporan keuangan melalui internet</p>
8.	Christophorus Heni Kurniawan, Lorencia Novi Kartika Scorpianti (2019)	<p>-Independen :</p> <p>Leverage, Opini audit, Kemandirian keuangan pemda</p> <p>-Dependen :</p> <p>Ketersediaan dan Keteraksesan IFR</p>	<p>-Sampel :</p> <p>70 Laporan keuangan pemda yang ada di Indonesia</p> <p>-Metode :</p> <p>Regresi Logistik Ordinal, Regresi Linier Variabel <i>dummy</i></p>	<p>Model Penelitian (1) Leverage berpengaruh negatif terhadap ketersediaan IFR, Opini audit dan Kemandirian keuangan pemda tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IFR. Sedangkan model penelitian (2) Leverage berpengaruh negatif terhadap keterikatan terhadap IFR, Opini audit dan kemandirian keuangan pemda berpengaruh positif terhadap keteraksesan IFR</p>

9.	Widya Putri, Mia Angelina Kurniawan (2022)	-Indepen : Kekayaan Daerah Belanja Daerah -Dependen : <i>Internet Financial Reporting</i>	-Sampel : 19 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat -Metode : Regresi berganda	Bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap IFR, sedangkan Belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan IFR
10.	Hendrik Wijaya (2020)	-Independen: Politic Competition, Leverage, Opini audit, Kekayaan Pemda, Ukuran Pemda, Tipe Pemerintah -Dependen : <i>Internet Financial Reporting</i>	-Sampel : 49 Pemerintah kota /Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah -Metode : Regresi Berganda	Hasil penelitian bahwa semua variabel Independen tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting



2.8 Pengembangan Hipotesis

Perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bertujuan guna menguji pengaruh Ukuran Pemerintah, Belanja Daerah, Pendapatan perkapita, Kinerja Keuangan terhadap *Internet Financial Reporting*. Berdasarkan penelitian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.8.1 Pengaruh Ukuran Pemda Terhadap *Internet Financial Reporting*

Pemerintah berperilaku sesuai apa yang menjadi kepentingan bersama dan apabila kepentingan tersebut bertentangan antara *steward* dan *principal* maka *steward* akan selalu berusaha bekerja sama daripada menentang atau bahkan sampai ribut dengan *principal*. Penyebab dari kejadian ini yaitu karena *steward* merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku yang dilakukan oleh *principal* merupakan pertimbangan yang rasional serta *steward* akan melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Darma Nasution, 2022). Ukuran pemerintah menjadi faktor yang mendasari penerapan teori stewardship pada penelitian ini, karena pemerintah akan mementingkan kepentingan masyarakat untuk terpenuhinya fasilitas publik. Masyarakat atau *principal* akan memperdulikan dan akan mengawasi kinerja keuangan yang dilakukan pemerintah dengan cara memantau *website* pemerintah berisi laporan keuangan daerah yang telah digunakan untuk kepentingan publik agar tidak terjadi penyelewengan dana anggaran. Dengan begitu pemerintah akan mempublikasikan laporan keuangannya melalui internet untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkannya.

Ukuran pemerintah merupakan sebuah nilai yang dapat memperlihatkan seberapa besar atau kecilnya suatu keadaan dari pemerintah daerah (Hartono, 2014). *Internet Financial Reporting* (IFR) sebenarnya berfungsi untuk menekankan dan meminimalisir biaya untuk pemantauan dalam pelaporan keuangan melalui internet pada *website* pemerintah, selain itu juga fungsi IFR lebih efisiensi bagi masyarakat dalam memperoleh informasi (Masra dan Sari, 2020). Suatu daerah yang mempunyai kekayaan yang besar, maka akan mendapatkan pengawasan yang cukup ketat dari masyarakat. Adanya pengawasan tersebut bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya bisa mempublikasikan laporan keuangan melalui media yang bisa dijangkau masyarakat contohnya yaitu internet. Mempublikasikan laporan tersebut juga harus secara transparan dan akuntabilitas.

Seperti penelitian dari Trisnawati,(2013) Ukuran Pemerintahan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Mempublikasikan *Internet Financial Reporting*. Didukung lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Nosihana dan Yaya, (2016) menyatakan bahwa Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap IFR. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trisnawati, (2013) dan Nosihana dan Yaya (2016), maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Ukuran pemda berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*

2.8.2 Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap *Internet Financial*

Reporting

Teori *Stewardship* didefinisikan bahwa dimana situasi ketika pemerintah tidak termotivasi dengan tujuan individu, tetapi lebih merupakan pelayanan *steward* yang motifnya selaras dengan tujuan *principal* mereka (Hadianto dan Murtin, 2020). Keterkaitan teori tersebut dengan variabel pendapatan perkapita yaitu pemerintah akan termotivasi dengan memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dalam suatu daerah, yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Pendapatan perkapita yang semakin besar akan timbul pengawasan, permintaan transparansi dan akuntabilitas oleh masyarakat mengenai pelaporan keuangan dari *website* pemerintah.

Pendapatan perkapita merupakan jumlah yang akan muncul dari seluruh perekonomian yang ada di wilayah itu (Masra dan Sari, 2020). Pendapatan perkapita juga memiliki tujuan untuk melihat seberapa besar tingkat kesejahteraan kepada masyarakat dalam suatu dan sebuah daerah (www.bps.go.id). Daerah dengan pendapatan perkapita lebih besar memiliki permintaan akuntabilitas yang lebih tinggi (Ingram, 2004). Daerah dengan pendapatan yang tinggi maka akan mempunyai pengawasan politis yang lebih ketat oleh kelompok masyarakat dan akan lebih banyak permintaan tentang informasi dengan mengikutsertakan informasi terkait ukuran-ukuran kinerja (Mutihah, 2017). Transparansi saat ini sangat penting, masyarakat sangat memerlukan akan informasi publik, yaitu informasi ketersediaan informasi keuangan yang berupa laporan keuangan. Dengan begitu semakin tingginya pendapatan perkapita di suatu daerah maka, semakin

tinggi pula pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi keuangan melalui *website* yang dimilikinya, agar pengawasan dari masyarakat tetap terjaga.

Dari penelitian yang dilakukan Masra dan Sari (2020) dan Wau (2015) yang menemukan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting*. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*

2.8.3 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap *Internet Financial Reporting*

Konsep teori *stewardship* menggap bahwa pemerintah suatu daerah bertanggungjawab kepada masyarakat untuk mengelola keuangan atau kekayaan daerah yang telah dipercayakan kepadanya. Hakikat sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dan bertanggung jawab , mempunyai integritas dan memiliki sifat jujur menjadi suatu dasar filosofi dari teori *stewardship* untuk kepentingan publik. Teori *stewardship* juga menganggap bahwa telah terdapat hubungan yang cukup kuat antara kesuksesan organisasi dalam melindungi dan memaksimalkan kinerja organisasi (Arfiansyah, 2020). Pemerintah daerah direpresentasikan oleh pemerintah pusat yang bertindak sebagai *steward* dan masyarakat bertindak sebagai pemilik dana (*principal*). Keterkaitan dari keduanya dapat dilihat dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terutama belanja daerah yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu pemerintah daerah berkewajiban untuk menyajikan dan

mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengguna informasi dan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan.

Belanja daerah merupakan suatu kekayaan pemerintah daerah yang diakui sebagai harta yang dapat mengurangi nilai kekayaan dari daerah tersebut (Masra dan Sari, 2020). Semakin tinggi belanja daerah, dapat diartikan bahwa pemerintah daerah telah menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan publik, sehingga semakin tinggi pula keinginan pemerintah dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada publik melalui *website* pemerintah daerah (Putri dan Setiawan, 2022). Dengan adanya publikasi laporan keuangan pemerintah melalui *website*, maka akan semakin memudahkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam mengelola uang negara. Belanja daerah menjadi faktor pendorong bagi pemerintah dalam pengungkapan laporan keuangan melalui internet, karena semakin tinggi belanja daerah maka akan menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sudah baik dan fasilitas berkualitas yang dapat digunakan secara maksimal (Putri dan Setiawan, 2022).

Hal ini didukung dari penelitian yang dilakukan Putri dan Setiawan (2022) dan Masra dan Sari (2020) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : Belanja daerah berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*

2.8.4 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Internet Financial Reporting*

Menurut Jefri (2018) Teori *Stewardship* merupakan sifat dasar manusia yang dapat dipercaya menjadi dasar terciptanya *stewardship*, dimana pemerintah diharapkan menjadi pengelola sistem pemerintah yang mementingkan kepentingan publik dari kepentingan pribadinya dan berasumsi bahwa bila kepentingan publik tercapai maka kepentingan pribadinya dapat terpenuhi. Dengan kata lain bahwa adanya teori ini dapat menjelaskan bahwa kinerja keuangan menjadi faktor dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah untuk dapat menilai kondisi keuangan yang ada di pemerintahan daerah tersebut. Kinerja keuangan yang dilakukan oleh pemerintah harus mementingkan kepentingan masyarakat luas terlebih dahulu dibandingkan kepentingan pribadi, karena dengan mementingkan kepentingan publik maka masyarakat akan lebih sejahtera dan akan percaya dengan kinerja keuangan yang dilakukan pemerintah.

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu pemerintahan yang dapat dianalisis, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu pemerintah daerah yang dapat menjelaskan mengenai prestasi kerja dalam periode tertentu (Faisal dkk., 2018). Selain itu menurut Abdillah (2015) kinerja keuangan merupakan representatif dari suatu keadaan pemerintah daerah terutama berkaitan dengan posisi keuangan masing-masing pemerintahan daerah baik pada tahun sebelumnya maupun tahun berjalan. Kinerja keuangan menggambarkan tentang tingkat kemandirian pada suatu pemerintahan daerah. Bukan hanya itu kinerja keuangan juga dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya

yang ada secara maksimal guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar (Nufus dkk, 2019). Semakin tinggi nilai kinerja keuangan pemerintah maka akan semakin baik dalam pengungkapan laporan keuangan melalui internet pada website pemerintah, tetapi jika kinerja keuangan pemerintah dinilai rendah maka pemerintah akan mempersulit pengungkapan laporan pada suatu daerah tersebut.

Hal ini didukung oleh penelitian Nufus dkk (2019) yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut :

H4 : Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*



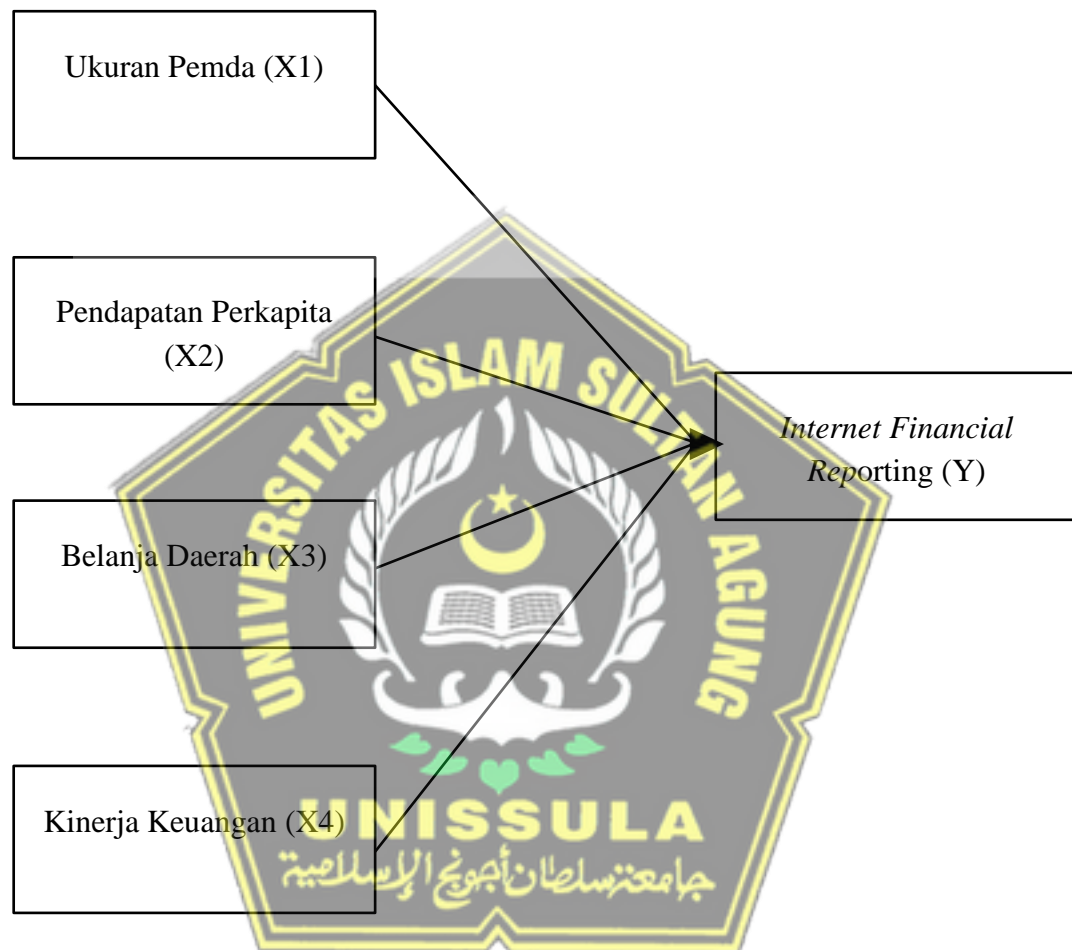
2.9 Kerangka Pemikiran Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Stewardship Theory*. *Stewardship Theory* sendiri menjelaskan bahwa adanya hubungan masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *steward* dimana pemerintah daerah diharapkan agar dapat mempublikasikan laporan keuangan secara transparan karena sudah diberi kepercayaan dari masyarakat.

Pentingnya penerapan *Good Governance* agar dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah mampu mewujudkan akuntabilitas sehingga mewujudkan pemerintah yang jujur serta berintegritas tinggi. Untuk itu pemerintah daerah harus melakukan transparansi yaitu dengan cara pengungkapan laporan keuangan melalui internet yang dapat diakses masyarakat.

Penelitian ini hendak mencapai pengaruh variabel Independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat), dimana yang menjadi variabel independen adalah Ukuran Pemerintah (X1), Pendapatan Perkapita (X2), Belanja Daerah (X3), Kinerja Keuangan (X4) yang menjadi variabel dependen adalah *Internet Financial Reporting* (Y).

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran teori penelitian ini dapat disajikan pada gambar 2.1 :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif untuk mengukur data dan melakukan generalisasi hasil dari sampel ke populasi, dengan menggunakan alat statistik dan menganalisis data baru apabila data sudah terkumpul semua (Rahayu dkk, 2016). Desain penelitian ini sebenarnya menggunakan desain kausalitas. Desain penelitian kausalitas merupakan jenis penelitian yang dibuat guna meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel independen maupun variabel dependen, sehingga peneliti mampu menyatakan klasifikasi variabel-variabelnya (Suparyanto dan Rosad, 2020). Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan *Explanatory research*. *Explanatory research* merupakan penelitian yang menghubungkan antara variabel yang dihipotesiskan (Sutanto dkk, 2018). Hipotesis yang diterangkan sebelumnya akan diuji kebenarannya. Hipotesis akan mengungkapkan ada tidaknya pengaruh atau hubungan satu dengan variabel lainnya, adakah variabel yang dipengaruhi atau mempengaruhi. Penelitian ini menganalisis faktor- faktor yaitu ukuran pemda, belanja daerah, pendapatan perkapita , dan kinerja keuangan yang mempengaruhi pengungkapan Internet Financial Reporting pada pemerintahan dengan menggunakan alat statistik.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah sebuah kumpulan elemen dengan cakupan luas yang mempunyai ciri-ciri umum dan terdiri dari bidang – bidang untuk dilakukan penelitian (Nuha, 2017). Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pemda yang ada pada Kabupaten/ Kota yang terletak di Jawa Tengah. Jumlah dari Kabupaten dan Kota yang dimiliki yang ada di Jawa Tengah adalah 29 Kabupaten dan 6 kota, serta Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai objek yang diteliti karena Pemda Jawa Tengah masih sedikit yang meneliti terkait *Internet Financial Reporting* pada kantor pemerintahan. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian agar pemda di Jawa Tengah mengetahui apa saja faktor faktor yang bisa mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan melalui internet. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dana yang dikelola pemerintah, sehingga tindakan penyalahgunaan laporan keuangan pemerintah sering terjadi dan seringkali pemda juga tidak mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat padahal itu sangat perlu dilakukan agar masyarakat dapat menilai dan mengawasi kinerja pemerintah daerah tersebut.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan sub kelompok dari sebuah populasi yang telah dipilih sebagian untuk digunakan dalam penelitian (Nuha, 2017). Sampel pada penelitian ini adalah pemda yang dipilih dengan Teknik *Sampling* jenuh (*Sensus*). *Sampling* jenuh (*Sensus*) sendiri merupakan proses pengambilan sampel dengan mengambil semua populasi yang ada tanpa adanya kriteria tertentu (Nur Sayidah, Nurhayati, 2016). Yang memakai seluruh populasi yang ada yaitu 29 Kabupaten dan 6 Kota, serta Provinsi Jawa Tengah sendiri. Sampel tersebut diambil dari situs resmi atau *website* yang dimiliki pemda Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data sekunder merupakan jenis data atau sumber data diperoleh secara tidak langsung dan juga ditemukan melalui media lainnya. Data yang akan dianalisis yaitu laporan keuangan 3 tahun terakhir (2019, 2020, 2021). Ukuran pemda, belanja daerah, pendapatan perkapita, dan kinerja keuangan merupakan variabel Independen yang akan diteliti. Sumber data yang diperoleh yaitu dari masing-masing *website* pemerintahan yang tersedia.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang merupakan sebuah metode pengumpulan data yang tidak langsung kepada subjek penelitian atau pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang digunakan untuk bahan analisis peneliti. Dokumen yang digunakan adalah dokumen sekunder yaitu berupa laporan keuangan untuk mengetahui pengaruh dari berbagai faktor dalam pengungkapan dan mempublikasi laporan keuangan melalui *website* yang digunakan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

3.5 Operasionalisasi Variabel

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dapat terpengaruh dari variabel bebas. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah *Internet Financial Reporting* (IFR) atau tersedianya informasi keuangan daerah dalam situs pemerintah. *Internet Financial Reporting* adalah sebuah laporan keuangan yang akan dipublikasikan informasi-informasi keuangan melalui internet (Nosihana dan Yaya, 2016). Untuk mengukur *Internet Financial Reporting* yaitu sesuai dengan ketersediaan informasi keuangan yang tertuang dalam ketentuan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 pada situs resmi setiap pemda di Indonesia dan terdapat 12 poin untuk setiap daerah. Komponen yang dihitung adalah sebagai berikut :

1. Ringkasan RKA SKPD
2. Ringkasan RKA PPKD
3. Rancangan Perda
4. Rancangan Perda perubahan APBD
5. Perda APBD
6. Perda Perubahan APBD
7. Ringkasan DPA SKPD
8. Ringkasan DPA PPKD
9. LRA SKPD
10. LRA PPKD
11. LKPD yang telah audit
12. Opini BPK

Analisis pengukuran variabel dependen yang akan diuji dengan rumus ini adalah :

$$IFR = \frac{\sum Score}{Max (12)}$$

Dimana :

\sum score = Jumlah atau nilai setiap komponen

Max = Nilai maksimal komponen pengungkapan

3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen, dimana variabel Independen atau variabel bebas dapat berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah :

a. Ukuran pemda

Ukuran pemda adalah semua total aset yang dimiliki daerah tersebut untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan memadai untuk masyarakat (Sari dan Mustanda, 2019). Sebagai penentu besar kecilnya ukuran pemda dapat dilihat dari total aset pemda. Pengukuran ini sesuai dengan penelitian Nosihana dan Yaya (2016).

$$\text{Size} = \text{Total Aset Pemda}$$

b. Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan nasional atau pendapatan daerah di suatu negara atau daerah dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut (Wau, 2015). Tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan perkapitanya. Menurut Masra dan Sari (2020) pengukuran pendapatan perkapita diukur dengan rumus berikut :

$$\text{Pendapatan Perkapita} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

c. Belanja daerah

Belanja daerah merupakan semua realisasi pemda yang digunakan untuk belanja kebutuhan daerah dan dapat mengurangi nilai kekayaan bersih (Putri danSetiawan, 2022). Menurut Masra dan Sari (2020) belanja daerah diukur dengan rumus berikut :

$$\text{Belanja Daerah} = \text{total belanja daerah}$$

d. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai gambaran atas kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut (Nufus dkk, 2019). Pengukuran ini sesuai dengan penelitian Nufus dkk (2019) yaitu dengan rumus berikut :

$$\text{Kinerja Keuangan} = \text{Surplus/Defisit di LRA}$$



3.6 Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diuji dengan memakai program SPSS (*Statistical Product And Service Solution*) dengan teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji apakah ada pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Detail Olah data yang akan digunakan yaitu : Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Pengujian Hipotesis.

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menggunakan nilai dari variabel independen yang diketahui sehingga menghasilkan nilai variabel dependen (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menguji pengaruh pada 4 variabel bebas. Analisis persamaan regresi yang akan diuji sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Masra dan Sari (2020) adalah sebagai berikut :

Persamaan regresi penelitian : $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$

Dimana :

Y = *Internet Financial Reporting*

X1 = Ukuran Pemerintah

X2 = Pendapatan Perkapita

X3 = Belanja Daerah

X4 = Kinerja Keuangan

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄ = Koefisien regresi masing-masing x

e = Error term

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang memungkinkan objek yang ingin dideskripsikan atau yang akan dianalisis dengan menggunakan data sampel atau populasi, penjelasan kelompok menggunakan minimum, maksimum, median, mean, dan standar deviasi (Sugiyono, 2018).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan analisis yang dipakai untuk menilai sebuah model regresi linier apakah di dalam sebuah regresi tersebut terdapat masalah-masalah asumsi klasik atau tidak (Mardiatmoko, 2020). Beberapa uji asumsi klasik yang akan digunakan meliputi :

3.6.2.1 Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai residual sudah terdistribusi secara normal atau tidak, model regresi yang baik yaitu jika memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal (Mardiatmoko, 2020). Penelitian ini dilakukan uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov. Pengambilan keputusan yang akan ditetapkan apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan data tersebut terdistribusi secara normal dan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan data tersebut tidak didistribusikan secara normal.

3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah sebuah keadaan apabila terjadi ketidaksamaan varian dari residual semua pengamatan yang dilakukan pada model regresi. Cara yang akan dilakukan dalam pengujian ini yaitu dengan Uji Glejser, pengujian ini dilakukan dengan cara meregresikan variabel bebas terhadap nilai *absolute residual* (Mardiatmoko, 2020). Pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji glejser adalah sebagai berikut :

- Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
- Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka terdapat heteroskedastisitas

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas merupakan suatu keadaan apabila terjadi hubungan linier yang sempurna atau hubungan yang mendekati antara variabel independen dalam model regresi. Jika suatu regresi dinyatakan mengalami multikolinieritas apabila ada fungsi linier yang sempurna di beberapa atau semua independen variabel dalam fungsi linier (Mardiatmoko, 2020). Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas menggunakan nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai tolerance dan VIF yaitu sebagai berikut :

- Jika tolerance $< 0,10$ VIF > 10 , maka terjadi multikolinieritas
- Jika tolerance $> 0,10$ VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan keadaan sebagaimana model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat autokorelasi (Mardiatmoko, 2020). Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) dengan kriteria pengambilan keputusannya :

1. Jika nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Jika nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Jika nilai DW lebih besar daripada $(4-dl)$, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti autokorelasi negatif
4. Jika nilai DW terletak diantara batas atas dan batas bawah ada DW terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis penelitian dilakukan dengan menguji persamaan variabel secara parsial maupun simultan :

3.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi dipergunakan untuk mengukur besar variabel independen yang dapat menjelaskan variabel independen. Nilai koefisien determinasi terdapat antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), yang dapat menunjukkan nilai R^2

yang semakin tinggi sebuah regresi yang memiliki nilai mendekati 1 maka akan baik bila regresi yang dihasilkan (Imam, 2018)

3.6.3.2 Uji Signifikan Parameter Individu (Uji t)

Pengujian uji t dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh dari tiap masing-masing variabel bebas terhadap variabel independen dengan variabel dependen (Masha dan Sari, 2020). Hipotesis yang akan diuji :

1. Menentukan Hipotesisnya :
 - a. $H_0 : \beta_i = 0$, artinya bahwa variabel independen secara parsial bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
 - b. $H_a : \beta_i \neq 0$, artinya bahwa variabel independen secara parsial merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Tingkat signifikan
Menggunakan pengujian *Significant standar level* 0,05 atau $\alpha = 5\%$
3. Kriteria pengambilan keputusan :
 - a. Jika signifikan $< 5\%$ (0,05) dan arah koefisien β sesuai dengan arah hipotesis , maka H_0 ditolak, H_a diterima.
 - b. Jika signifikan $> 5\%$ (0,05) maka H_0 diterima, H_a ditolak.

3.6.3.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk membuktikan apakah semua variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel yang terikat (Masra dan Sari, 2020). Hipotesis yang hendak diuji adalah sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesisnya :
 - a. $H_0 : \beta_i =$ Variabel dependen secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
 - b. $H_a : \beta_i \neq$ Variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Menentukan tingkat signifikan
Menentukan *significant level* 0,05 atau $\alpha = 5\%$
3. Kriteria keputusan :
 - a. Apabila nilai signifikan $< 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
 - b. Apabila nilai signifikan $> 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a ditolak, artinya semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan berupa laporan keuangan dan tahunan pemerintah daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengah pada periode 2019- 2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan menggunakan teknik sampling sensus dimana seluruh populasi tetap dijadikan sampel . Jumlah sampelnya yaitu ada 29 Kabupaten, 6 Kota, dan 1 Pemda provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Keterangan	2019	2020	2021	Total
1.	Pemerintah Daerah yang mempunyai <i>website</i> resmi yang dapat diakses	36	36	36	108
2.	Yang tidak menerbitkan laporan keuangan melalui <i>website</i> pemerintah daerah	1	2	1	4
Total sampel keseluruhan		35	34	35	104

Sumber: Data diolah, 2023

Seluruh Populasi yang dijadikan sampel yaitu total awal 108 sampel yang akhirnya hanya menjadi 104 sampel yang digunakan. Karena ada 4 sampel yang data nya tidak ada pada *website* pemerintah daerah setempat. Total 4 sampel tersebut terdiri dari laporan keuangan 3 tahun terakhir (2019 - 2021) pada kabupaten kendal dan laporan keuangan tahun 2020 pada Kabupaten Sragen.

4.2 Analisis Data Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan analisis data untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah dikumpulkan untuk dijadikan sebuah kesimpulan. Data yang diambil dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi (Sutanto dkk., 2018). Dari tabel hasil analisis deskriptif diatas diketahui jumlah data yang diolah ada 104 data yang kemudian diolah peneliti, dan kesimpulan yang diperoleh dapat dilihat bahwa :

1. Variabel Ukuran Pemerintah (X1) memiliki nilai minimum sebesar Rp.166.504.427.731 dan nilai maksimum Rp.39.291.945.337.213 sedangkan mean Rp.5.698.321.693.273 yang artinya bahwa rata-rata aset yang diperoleh pemerintah daerah di Jawa Tengah sebesar Rp.5.698.321.693.273 dan Nilai standar deviasi dalam penelitian ini sebesar Rp.6.495.963.602.307.
2. Variabel Pendapatan Perkapita (X2) memiliki nilai minimum sebesar Rp.129.494 dan nilai maksimum Rp.2.070.730 sedangkan mean Rp.491.636 yang artinya bahwa masyarakat di Jawa Tengah memperoleh

pendapatan perkapita rata-rata sebesar Rp.491.636 dan Nilai standar deviasi dalam penelitian ini sebesar Rp.412.693.

3. Variabel Belanja Daerah (X3) memiliki nilai minimum sebesar Rp.86.695.688.605 dan nilai maksimum Rp.27.444.652.233.000 sedangkan mean Rp.2.681.404.351.495 yang artinya bahwa anggaran belanja daerah pemerintah daerah di Jawa Tengah memperoleh nilai anggaran rata-rata sebesar Rp.2.681.404.351.495 dan Nilai standar deviasi dalam penelitian ini sebesar Rp.3.519.077.489.110.
4. Variabel Kinerja Keuangan (X4) memiliki nilai minimum sebesar Rp.16.995.946.278 dan nilai maksimum Rp.11.961.163.060.019 sedangkan mean Rp.361.786.597.053 yang artinya bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari surplus/defisit pada laoran keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah mempunyai nilai rata-rata sebesar Rp.361.786.597.053 dan Nilai standar deviasi dalam penelitian ini sebesar Rp.1.197.630.713.834.
5. Variabel *Internet Financial Reporting* (Y) memiliki nilai minimum sebesar 0,67 dan nilai maksimum 1,00 sedangkan mean 0,8829 yang artinya bahwa pengungkapan dokumen laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Jawa Tengah mempunyai nilai rata-rata dokumen yang di upload sebesar 0,8829 atau sebanyak 10 dokumen dan Nilai standar deviasi dalam penelitian ini sebesar 0,10402.

Berikut adalah tabel hasil analisis deskriptif :

Tabel 4. 2
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemerintah	104	166,5	39,3	5,7	6,5
Pendapatan Perkapita	104	129.494	2.070.730	491.636	412.693
Belanja Daerah	104	86,7	27,4	2,7	3,5
Kinerja Keuangan	104	17	12	361.8	1,2
Internet Financial reporting	104	0,67	1,00	0,8829	0,10402
Valid N (listwise)	104				

Keterangan :

- dalam triliun rupiah (Ukuran pemerintah, Belanja Daerah, Kinerja keuangan (Bagian maximum dan std.deviasi))

- dalam milyar rupiah (Ukuran pemerintah (bagian minimum), Kinerja Keuangan, belanja daerah (bagian minimum dan Mean))

Sumber : Data diolah, 2023

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual bertujuan untuk menguji dan mengetahui nilai residual sudah terdistribusi secara normal atau tidak, model regresi yang mempunyai nilai residual yang terdistribusi secara normal (Mardiatmoko, 2020). Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-smirnov Test* yang dimana data dapat didistribusikan normal apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5%. Hasil uji normalitas residual dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
	N	104
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,11183834
Most Extreme Differences	Absolute	0,079
	Positive	0,063
	Negative	-0,079
Test Statistic		0,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,109 ^c

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil Uji Normalitas pada tabel 4.3 menunjukkan nilai Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 0,109. Maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini berdistribusi secara normal. Sebelum didapatkan hasil Sig.(2-tailed) sebesar 0,109 telah diperoleh Sig.(2-tailed) sebesar 0,000 lalu dilanjutkan dengan mengolah data lanjutan dengan mentransformasi data dalam bentuk Logaritma Natural (Ln) agar data bisa terdistribusi secara normal.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan linier yang sempurna atau hubungan yang mendekati antara variabel independen dengan variabel dependen dalam model regresi (Mardiatmoko, 2020). Berikut hasil uji multikolinieritas yang dapat dilihat pada Tabel. 4.4 :

Tabel 4. 4
Hasil Analisis Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

	Model	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ukuran Pemerintah	0,164	6,110
	Pendapatan Perkapita	0,797	1,254
	Belanja Daerah	0,165	6,067
	Kinerja Keuangan	0,983	1,017
a. Dependent Variable : Internet Financial Reporting			

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 dari hasil analisis uji multikolinearitas, nilai VIF dibawah 10 dan nilai tolerance diatas 0,1. Maka dari itu hasil Uji Multikolinieritas diatas menyimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinieritas antara sesama variabel bebas, sehingga pengolahan data dengan regresi linier berganda dapat dilanjutkan.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui terjadinya ketidaksamaan varian dari residual semua pengamatan yang dilakukan pada model regresi (Mardiatmoko, 2020). Pengujian Heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser. Berikut hasil yang dapat dilihat pada Tabel 4.5 :

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas- Uji Glejser
Coefficient^a

Model		Sig.
1	(Constant)	0,000
	Ukuran Pemerintah	0,557
	Pendapatan Perkapita	0,054
	Belanja Daerah	0,687
	Kinerja Keuangan	0,255
a. Dependent Variable: Abs_RES		

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil Uji glejser diatas, semua variabel independen yaitu Ukuran pemerintah, pendapatan perkapita, belanja daerah, dan kinerja keuangan memiliki nilai signifikan diatas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi Heteroskedastisitas. Data yang baik adalah data yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Masra dan Sari, 2020).

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi ini memiliki tujuan apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya . Apabila muncul sebuah korelasi antara kesalahan maka ada masalah autokorelasi. Berikut hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.6 :

Tabel 4. 6
Hasil Uji Autokorelasi – Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,682 ^a	0,465	0,460	0,06949030	1,815

- a. Predictors: (Constant), LAG_X4,
LAG_X1, LAG_X2, LAG_X3
b. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil Uji Durbin-Watson diatas menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,815. Nilai ini akan dibandingkan dengan DW tabel dengan jumlah Sampel 104, variabel bebas 4/ k=4, tingkat kepercayaan 5%. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,815 dilihat dari tabel hasil nilai Durbin-Watson sebagai berikut :

dl	du	dw	4-du	4-dl
1,6016	1,7610	1,815	2,239	2,3984

Syarat Uji Autokorelasi :

$du < dw < 4 - du$	Tidak terjadi Autokorelasi
--------------------	----------------------------

Keterangan :

$$N = 104$$

$$DW = 1,815$$

$$Dl = 1,6016$$

$$Du = 1,761$$

$$4 - Dl = 4 - 1,6016$$

$$= 2,3984$$

$$4 - Du = 4 - 1,7610$$

$$= 2,239$$

Kesimpulan

$$= Du < Dw < 4 - Du$$

$$= 1,761 < 1,815 < 2,3984$$

Disimpulkan bahwa pengujian autokorelasi menggunakan Uji Durbin-Watson sudah memenuhi syarat yaitu $du < Dw < 4 - du$ atau $1,761 < 1,815 < 2,3984$ menyatakan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi, karena nilai Durbin Watson mendekati 2 atau kecil dari 2.

4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh nilai variabel independen yang diketahui sehingga menghasilkan nilai variabel dependen (Sutanto dkk., 2018). Hasil analisis linier berganda yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.7 :

Tabel 4. 7
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,202	0,755		2,917	0,004
LN_X1	0,004	0,024	0,21	0,151	0,880
LN_X2	0,061	0,021	0,303	2,958	0,004
LN_X3	0,047	0,029	0,235	1,651	0,102
LN_X4	0,007	0,013	0,049	0,049	0,617

a. Dependent Variable : LN_Y

Sumber : Data Diolah, 2023

Dari hasil analisis linier berganda pada tabel 4.7 maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dikembangkan sebagai berikut :

$$\text{IFR} = 2,202 + 0,004(\text{X1}) + 0,061(\text{X2}) + 0,047(\text{X3}) + 0,007(\text{X4})$$

Berdasarkan hasil kode persamaan analisis linier berganda diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai a sebesar 2,202 yang merupakan konstanta atau keadaan saat variabel *Internet Financial Reporting* belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel ukuran pemerintah (x1), pendapatan perkapita (x2), belanja daerah (x3), kinerja keuangan (x4). Jika variabel independen tidak ada maka variabel *Internet Financial Reporting* tidak mengalami perubahan.
2. Nilai koefisien regresi ukuran pemerintah sebesar 0,004, menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif terhadap *Internet Financial Reporting* yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel ukuran pemerintah akan mempengaruhi *Internet Financial Reporting* sebesar 0,004. Dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Nilai koefisien regresi Pendapatan perkapita sebesar 0,061, menunjukkan bahwa setiap variabel pendapatan perkapita mempunyai pengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel pendapatan perkapita akan mempengaruhi *Internet Financial Reporting* sebesar 0,061, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
4. Nilai koefisien regresi belanja daerah sebesar 0,047, menunjukkan bahwa setiap variabel belanja daerah mempunyai pengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel belanja daerah akan mempengaruhi *Internet Financial Reporting* sebesar 0,047, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Nilai koefisien regresi kinerja keuangan sebesar 0,007, menunjukkan bahwa setiap variabel kinerja keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel kinerja keuangan akan mempengaruhi *Internet Financial Reporting* sebesar 0,007, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien determinasi (R) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model yang dapat menyampaikan variabel terikat atau variabel dependen (Mardiatmoko, 2020). Berikut hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,401 ^a	0,161	0,127	0,09718

a. Predictors: (Constant), Kinerja Keuangan, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Perkapita, Belanja Daerah

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 hasil analisis koefisien nilai variabel independen menjelaskan sebesar 12,7% perubahan variabel dependen dalam model regresi penelitian ini dan sisanya 87,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk atau tidak diuji ke dalam model regresi penelitian ini.

4.5.2 Uji F

Uji F digunakan untuk membuktikan apakah semua variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (Masra dan Sari, 2020). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji F adalah $\alpha = 5\%$ apabila nilai signifikan $\alpha < 0,05$ maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil Uji F yang dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini :

Tabel 4. 9
Hasil Uji F
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,18	4	0,045	4,753	0,002 ^b
	Residual	0,935	99	0,009		
	Total	1,115	103			

a. Dependent Variable : *Internet Financial Reporting*

b. Predictors: (Constant), Kinerja Keuangan, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Perkapita, Belanja Daerah

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil Uji F pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar 4,753 dengan nilai signifikan 0,002 yang menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Independen berpengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen dengan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

4.5.3 Hasil Uji Hipotesis

Uji T digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat (Masra dan Sari, 2020). Berikut hasil pengujian Uji T dapat dilihat pada Tabel sebelumnya yaitu Tabel 4.7 :

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis pada tabel 4.7 maka akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengujian hipotesis pertama

Hipotesis pertama yaitu Ukuran Pemerintah berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*. Diketahui hasil uji T pada tabel 4.7 diperoleh nilai β 0,004 dengan nilai Sign $0,880 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

2. Pengujian hipotesis kedua

Hipotesis kedua yaitu Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*. Diketahui hasil uji T pada tabel 4.7 diperoleh nilai β 0,061 dengan nilai Sign $0,004 < 0,05$, sehingga dapat

disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

3. Pengujian hipotesis ketiga

Hipotesis ketiga yaitu Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*. Diketahui hasil uji T pada tabel 4.7 diperoleh nilai β 0,047 dengan nilai Sign 0,102 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat yaitu Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*. Diketahui hasil uji T pada tabel 4.7 diperoleh nilai β 0,007 dengan nilai Sign 0,617 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak yang berarti Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.



4.6 Pembahasan

Dari analisis data yang sudah diperoleh melalui laporan keuangan Pemerintah daerah dari masing-masing Kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah dan kemudian diolah menggunakan SPSS dengan metode analisis regresi berganda. Dalam Intruksi Mendagri Nomor 188.152/1797/SJ Tahun 2012 yang mengatur tentang pemerintah daerah harus mengungkapkan laporan keuangan melalui internet. Adanya Intruksi Mendagri membuat pemda harus melaksanakan dan mematuhi aturan tersebut. Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan untuk pembahasan sebagai berikut.

4.6.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap *Internet Financial Reporting*

Setelah melakukan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa Ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* yang dihitung menggunakan total seluruh aset pemda. Suatu daerah yang mempunyai aset atau kekayaan yang besar, maka akan mendapatkan pengawasan yang besar dari masyarakat. Adanya pengawasan yang ketat yaitu untuk menghindari penyalahgunaan dana dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian pada pemda di Jawa Tengah tidak ditemukan adanya pengaruh antara ukuran pemerintah dengan pengungkapan *Internet Financial Reporting*. Hal ini disebabkan karena adanya Intruksi Mendagri diatas yang mengatur tentang pemerintah daerah harus mengungkapkan laporan keuangan ke internet atau *website* resminya. Selain itu ada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 pasal 1 Tahun 2013 memperkuat bahwa pemda harus melaporkan laporan keuangan melalui internet. Peraturan Gubernur tersebut membahas

tentang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi pemda Jawa Tengah dan salah satunya terkait *Electronic Government* yang digunakan untuk lebih efisiensi, efektivitas, transparansi dalam pelaporan keuangan. Maka dari itu ukuran pemerintah yang kecil tidak berpengaruh terhadap pengungkapan karena pemda juga sudah melakukan tanggungjawab dan melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pengungkapan laporan keuangannya sesuai Intruksi Mendagri tersebut. Ukuran pemerintah yang kecil akan membuat pengawasan dari masyarakat kurang begitu ketat terhadap pengungkapan laporan keuangan. Pemerintah daerah di Jawa Tengah mempunyai nilai ukuran pemerintah yang kecil namun tingkat pengungkapan IFR nya tinggi, hasil ini bisa dilihat pada tabel 4.2 yang menjelaskan bahwa hasil minimum nilai IFR yaitu sebesar 0,67. Hasil ini tergolong tinggi karena sudah lebih dari 0,50. Ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IFR, namun ukuran pemerintah memberikan nilai yang positif dalam pengungkapan *Internet Financial Reporting* pada pemda di Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Masra dan Sari (2020) dan Wijaya (2020) yang membuktikan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian, jumlah aset yang dimiliki pemerintah daerah tidak berpengaruh dengan adanya dorongan dari pemerintah dalam mencoba menyediakan suatu informasi keuangan.

4.6.2 Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap *Internet Financial Reporting*

Setelah melakukan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* yang dihitung dengan semua total pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan jumlah penduduk. Perekonomian yang ada di masyarakat daerah dapat mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat, bukan hanya perekonomiannya melainkan mempengaruhi teknologi yang diaplikasikannya (Triandy dan Amir, 2014). Hal ini sesuai dengan *Stewardship theory* dimana pendapatan perkapita yang semakin besar dapat menimbulkan pengawasan, permintaan transparansi dan akuntabilitas oleh masyarakat mengenai pelaporan keuangan melalui *website* pemerintahan. Sesuai dengan pernyataan tersebut bahwa dasar dari sebuah pendapatan perkapita yang tinggi ada campur tangan dari masyarakat yang menjadi pengawas dalam pelaksanaan transparansi laporan keuangan melalui internet. Bukan hanya itu pendapatan perkapita yang semakin tinggi akan berpotensi bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan adanya pembayaran pajak dari masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Masra dan Sari(2020), Wau (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat maka sebuah pengungkapan transparansi informasi keuangan pada daerah akan mulai semakin besar pula.

4.6.3 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap *Internet Financial Reporting*

Hasil pengujian hipotesis bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Belanja daerah sendiri merupakan suatu kekayaan pemerintah daerah yang diakui sebagai harta yang dapat mengurangi nilai kekayaan dari daerah tersebut (Masra dan Sari, 2020). Menurut (kabar24.bisnis.com) yang menyatakan bahwa serapan anggaran belanja daerah paling rendah adalah Jawa Tengah. Data Direktorat Jendral (Ditjen) bina keuangan mencatat bahwa khusus dipulau jawa, realisasi belanja provinsi di Jawa Tengah adalah yang paling rendah. Seraapan anggaran Jawa Tengah berada jauh dibawah Jawa Barat dengan presentase 64% dan realisasi pendapatan 10,96 %. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah pada pemda jawa tengah belum dilakukan secara maksimal. Walaupun belanja daerah memiliki presentase kecil namun memiliki nilai pengungkapan yang tinggi. Nilai pengungkapan yang tinggi disebabkan karena pemda jawa tengah telah menjalankan Intruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 yang mengatur bahwa pemda harus melaksanakan tugasnya dalam hal pengungkapan laporan keuangan ke internet. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IFR

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Masra dan Sari (2020) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*, sedangkan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mutiha (2017) yang mendapatkan hasil bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Menurut

Mutiha (2017) nilai rasio belanja daerah yang tinggi maupun rendah sama- sama memiliki tingkat pengungkapan tinggi, sehingga besar kecilnya rasio belanja tidak berengaruh terhadap IFR.

4.6.4 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Internet Financial Reporting*

Hasil pengujian hipotesis kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting*. Kinerja keuangan merupakan kondisi keuangan suatu pemerintahan yang dapat dianalisis, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan pemerintah daerah yang dapat menjelaskan mengenai prestasi kerja dalam periode tertentu (Faisal dkk., 2018). Berdasarkan pada tabel 4.2 yang menjelaskan tentang rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah yaitu sebesar 361,8 Milyar, nilai tersebut tergolong rendah karena pada kenyataannya nilai maximumnya besar yaitu 12 Triliun. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemda yang memiliki kinerja yang tinggi tidak secara otomatis akan melakukan pengungkapan *Internet Financial Reporting*, memiliki presentase *website* yang juga tinggi, dan tidak secara otomatis akan melakukan transparansi melalui *website* pemda.

Besar kecilnya kinerja keuangan yang dimiliki pemda tetap mempunyai tingkat pengungkapan yang tinggi, karena kinerja pemda yang baik akan melaksanakan dan menjalankan tanggungjawabnya terhadap peraturan yang ada seperti adanya Intruksi Mendagri 188.52/1797/SJ Tahun 2012 yang mengatur bahwa pemda harus melakukan pengungkapan laporan keuangan ke internet atau ke *website* resminya. Adanya peraturan tersebut pemda akan selalu dan wajib melaporkan laporan keuangannya ke internet tanpa melihat presentase besar

kecilnya tingkat kinerja yang dimiliki. Alasan lain diperkuat dengan melihat tabel 4.2 nilai IFR sebesar 0,67 yang menyatakan bahwa nilai tersebut tergolong tinggi padahal nilai kinerja keuangannya rendah. Hal ini menyatakan bahwa tingkat kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap IFR.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Martani(2013) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pada website pemda. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nufus (2019) dengan hasil penelitian bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*. Namun pada penelitian ini tidak ditemukan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap IFR.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan judul penelitian Faktor Yang Mempengaruhi *Internet Financial Reporting* Pada Pemda Di Provinsi Jawa Tengah dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
2. Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
4. Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

5.2 Implikasi Penelitian

5.2.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) hal ini sejalan dengan teori *stewardship* bahwa pemerintah akan termotivasi dengan memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dalam suatu daerah. Pendapatan perkapita yang semakin besar akan timbul pengawasan, permintaan transparansi oleh masyarakat.

5.2.2 Implikasi Praktis

Untuk memotivasi pemerintah daerah agar mulai membangun dan mengembangkan *website* pemerintahan karena media tersebut sangat membantu komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih dekat dan mudah, selain itu masyarakat juga dapat menilai bahwa pemerintah lebih transparan dan akuntabel.



5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran

5.3.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil yang diteliti. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian ini tidak signifikan dari ukuran pemerintah, belanja daerah, dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan IFR. Hal ini terjadi karena pola persebaran data yang tidak sama antara variabel yang diuji.
2. Masih rendahnya nilai Adjusted R^2 sebesar 12,7%, hal ini menunjukkan masih banyak variabel lain yang memiliki kontribusi besar dalam mempengaruhi pengungkapan *Internet financial Reporting* (IFR).

5.3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Peneliti dapat periksa terlebih dahulu skor total dari setiap variabel apakah telah membentuk pola yang sama atau tidak, agar pola persebaran data bisa disamakan dan hasil penelitian signifikan.
2. Peneliti dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel lainnya seperti opini audit, *leverage*, kompetisi politik, indeks pembangunan masyarakat, dan visibilitas media.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. R. (2015). Pengaruh Kepemilikan Saham dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengukuran Internet Financial Reporting (IFR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013). *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 20–39.
- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 100. <https://doi.org/10.20961/jab.v17i2.226>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Darma Nasution, D. A. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Pada Sekretariat Dprd Provinsi Sumatera Utara. *Prosiding Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dharmawangsa*, 1(1), 72–77. <https://doi.org/10.46576/prosfeb.v1i1.39>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns Related papers CEO Dualit y: A Review and Research Agenda Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Faisal, A., Samben, R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis Kinerja Keuangan. *Kinerja*, 14(1), 6. <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i1.2444>
- Fatwa Amaliah, E. (2019). Analisis Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Hadianto, D., & Murtin, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial Reporting (Ifr) Pada Pemerintah Daerah. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4 No 2(03), 33–45.
- Hartono, J. (2014). Metode penelitian bisnis. *Edisi Ke-6. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada*.
- Jannah, M. (2016). Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1991, 14–66.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

- (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Juniantika, D. A., & Hapsari, D. W. (2020). What Motivates Internet Financial Reporting in the Public Sector? Case of a Local Government in Indonesia. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 3(2), 102–116. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v3i2.17235>
- Mardiatmoko, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Masra, E. A., & Sari, V. F. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (Ifr) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2757–2771. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.246>
- Mooduto, W. I. S. (2015). Reaksi Investor atas Pengungkapan Internet Financial Reporting. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 479–492. <https://doi.org/10.22219/jrak.v3i2.2114>
- Mutiha, A. H. (2017). Faktor penentu aksesibilitas internet financial reporting pada e-government pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat. *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, 550–560. <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8563>
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 89–104. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389>
- Nufus, S. R. H., Herwanti, T., & Santoso, B. (2019). Pengaruh Ukuran Pemda, Leverage dan Kinerja Keuangan terhadap IFR pada Pemda dengan Moderasi Opini Audit. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1012. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p08>
- Nuha, A. (2017). Populasi Dan Sampel. *Pontificia Universidad Catolica Del Peru*, 8(33), 44.
- Pemerintah RI. (2004). *UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang memberikan Otonomi yang luas agar terciptanyanya masyarakat yang sejahtera*. 1–63.
- Pemerintah RI. (2004). *UU No 33 Tahun 2004. 1–3. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah*

- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112.
- Putri, W., & Setiawan, M. A. (2022). Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 438–448. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i2.482>
- Rahayu, H. S., Budiyono, B., & Usodo, B. (2016). Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Three Steps Interview (Tsi) Dan Think Pair Share (Tps) Pada Materi Fungsi Ditinjau Dari Kecerdasan Logis Matematis Siswa Kelas Viii Smp Negeri Se-Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2015/2016. *Journal of Mathematics and Mathematics Education*, 6(2), 1–39. <https://doi.org/10.20961/jmme.v6i2.10058>
- Rizki, F., & Ikhsan, A. E. (2018). Pengaruh Rasio Aktivitas, Risiko Sistematis, Dan Tingkat Kepemilikan Saham Terhadap Internet Financial Reporting (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 443–458.
- Romero, J. (Romero-L., Transparency International. International Secretariat, & Switzerland. Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe. (2019). *Anti-corruption agency strengthening initiative: assessment of the Bhutan Anti-Corruption Commission 2015-2019*.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Effect of Size of Government Regional Revenue Regional Original and Expenditure Capital of Performance Finance Government Area). *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759.
- Setiawan, A. S. (2020). Level Teknologi, Foreign Ownership, Dan Implementasi Internet Financial Reporting. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(2), 317–331.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The accessibility of financial reporting of u.s. municipalities on the internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56–92. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-19-01-2007-B003>
- Sutanto, S., Ghozali, I., & Handayani, R. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Dan Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Dalam Perspektif the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (Utaut 2) Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 15(1), 37. <https://doi.org/10.14710/jaa.15.1.37-68>
- Triandy, Y., & Amir, H. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Di Internet Oleh Pemerintah Daerah.

Accounting Analysis Journal, 3(4), 485–492.

Trisnawati, A. (2013). *Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet*.

UU Pemerintah RI. (2005). *Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 Pasal 3. 17(1)*, 15–17.

UU Pemerintah RI. (2008). UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi (JTIK) STMIK ProVisi Semarang*, 49–60.

Virgiawan, I. P. Y., & Diyanty, V. (2015). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Keluarga Dan Internet Financial Reporting (Ifr) Terhadap Asimetri Informasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 12(2), 123–146. <https://doi.org/10.21002/jaki.2015.08>

Wau, I. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksasan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 4, Issue 4).

Weygandt, J. J. (2007). *Accounting Principles, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5(3), 6–38

